

MADANI

Kajian Ilmiah Bidang Sosial, Politik, Komunikasi dan Informasi

Volume XIX, No. 1, Januari 2017

**Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan
Bupati Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan Dasar Di Kabupaten Pamekasan**
(Mohammad Sahur, M.IP dan Dr. Bambang Suprijadi, M.Si)

**Strategi Partai Perindo Dalam Menarik Simpati Pemilih Pemula;
Studi Kasus DPD Partai Perindo Kota Surabaya**
(Moch. Ramadhon, M.IP dan Rizca Yunike Putri, S.IP., M.IP)

**Partisipasi Politik Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Surabaya 2015
Di Kecamatan Semampir Kota Surabaya**
(Dr. Bambang Suprijadi dan M.Si Eka Pujiantoro, S.STP., M.IP)

**Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan;
Pelaksanaan PNPM Mandiri-P2KP di Badan Keswadayaan Masyarakat
Tanjung Harapan Kelurahan Dukuh Kupang Surabaya.**
(M. Fendi Priswarno, M.IP dan Yelly Elanda, S.Sos., MA)

**Implementasi Sk Kapolri 737 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Dan Strategi
Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri
Terhadap Pencegahan Gangguan Kamtibmas**
(Mardi Sampurno dan Bambang Prakoso, S.Sos., M.IP)

**Hubungan Kerjasama Negara Indonesia dan Negara Timor Leste
dalam Bidang Pendidikan**
(Paulo Soares Exposto, M.IP dan Sari Dewi Poerwanti, S.Sos, M.Kesos)

**Peranan Kepala Kelurahan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat
Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Benowo
Kecamatan Pakal Kota Surabaya**
(Soleman, M.IP dan Dian Kristianto, S.IIP., M.IP)

DITERBITKAN OLEH :

**FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

STRUKTUR PENGELOLA JURNAL MADANI

- Penanggung Jawab** : Drs. Sucahyo Tri Budiono, M.Si
- Pengarah** : Drs. Yudi Harianto C.U, M.IP
Drs. Ahmad Sufaidi, M.IP
- Dewan Pakar** : Dr. Bambang Suprijadi, M.Si
Dr. Mohammad Suud, MA
Prof. Ali Achsan Mustofa
Drs. Bakhtiyar, S.Sos., M.IP
- Pimpinan Redaksi** : Abdus Sair, S.Sos., M.Sosio
- Wakil Pimpinan Redaksi** : Mandra Nur Alia, S.Hub.Int., M.IP
- Sekretaris** : Bambang Prakoso, S.Sos., M.IP
- Bendahara** : Yelly Elanda, S.Sos., MA
- Redaksi** : Galang Geraldly, S.IP., M.IP
Sari Dewi Poerwanti, S.Sos, M.Kesos
Rizca Yunike Putri, S.IP., M.IP
Mandra Nur Alia, S.Hub.Int., M.IP
- Desain Layout** : Dian Kristianto, S.IIP., M.IP
Wahyu Kuncoro, S.IP., M.Sos
- Mitra Bestari** : Dr. Mohammad Zaki Ahmad, Ph.D (UUM)
Prof. Dr. Masoed Said, MM (UNMU)
Prof. Kacung Maridjan, MA., Ph.D
Prof. Dr. Sam Abede Parera, M.Si
- Alamat Redaksi** : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Jl. Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya (60255)
Telp. 031-567.7577 Ext. 158 Fax. 031-5679791
Email: madanifisip.uwks@gmail.com

Daftar Isi

Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten Pamekasan (Mohammad Sahur, M.IP dan Dr. Bambang Suprijadi, M.Si)	1-13
Strategi Partai Perindo Dalam Menarik Simpati Pemilih Pemula; Studi Kasus DPD Partai Perindo Kota Surabaya (Moch. Ramadhon, M.IP dan Rizca Yunike Putri, S.IP., M.IP)	14-25
Partisipasi Politik Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Surabaya 2015 Di Kecamatan Semampir Kota Surabaya (Dr. Bambang Suprijadi dan M.Si Eka Pujiantoro, S.STP., M.IP)	26-39
Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan; Pelaksanaan PNPM Mandiri-P2KP di Badan Keswadayaan Masyarakat Tanjung Harapan Kelurahan Dukuh Kupang Surabaya. (M. Fendi Priswarno, M.IP dan Yelly Elanda, S.Sos., MA)	40-51
Implementasi Sk Kapolri 737 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri Terhadap Pencegahan Gangguan Kamtibmas (Mardi Sampurno dan Bambang Prakoso, S.Sos., M.IP)	52-69
Hubungan Kerjasama Negara Indonesia dan Negara Timor Leste dalam Bidang Pendidikan (Paulo Soares Exposto, M.IP dan Sari Dewi Poerwanti, S.Sos, M.Kesos)	70-83
Peranan Kepala Kelurahan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Benowo Kecamatan Pakal Kota Surabaya (Soleman, M.IP dan Dian Kristianto, S.IIP., M.IP)	84-95

**Partisipasi Politik
Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Surabaya 2015
Di Kecamatan Semampir Kota Surabaya**

**Dr. Bambang Suprijadi, M.Si
Eka Pujiantoro, S.STP., M.IP**

Abstrak

Penelitian ini menyoroti masalah partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Dalam pelaksanaan Pilkada langsung, Kecamatan Semampir. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan wawancara. Wawancara secara mendalam kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, Pejabat Kecamatan Semampir dan beberapa warga masyarakat di Kecamatan Semampir. Hasil penelitian ini tidak dapat dijadikan acuan untuk penelitian di wilayah lainnya. Oleh karenanya perlu diadakan penelitian yang sama di wilayah lainnya untuk mengetahui/ membandingkan hasil penelitian ini untuk mengetahui lebih banyak lagi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik dalam pilkada. Semoga pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015 bisa menjadi cerminan bagi pelaksanaan pilkada di daerah lainnya.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Kecamatan Semampir, Pilwali Kota Surabaya 2015

I. Pendahuluan

Paska diberlakukannya politik desentralisasi tahun 2001, pemilihan di tingkat daerah (Pilkada) menjadi bagian dari narasi demokratisasi. Didalam Pilkada idealnya merupakan proses didalam penguatan demokrasi, yang berarti masyarakat memiliki kesadaran di dalam berdemokrasi untuk menuju lajur demokrasi yang benar. Seberapa jauh Pilkada selama ini memberi ruang partisipasi politik bagi rakyat tentu tak lepas dari kondisi atau sistem politik yang sedang berproses. Sistem kepolitikan bangsa Indonesia hingga saat ini telah berkali kali mengalami perubahan, mulai orde baru sampai pada reformasi yang dimaknai sebagai era yang lebih demokratis.

Terkait salah isu besar dalam setiap pilkada yaitu partisipasi politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mematok target nasional tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak 2015 sebesar 77,5 persen. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mematok target 80 persen, tetapi KPU menargetkan 75 persen, sehingga disepakati bersama 77,5 persen secara nasional.¹

Berangkat dari hal tersebut, peneliti beraras pada partisipasi politik di momen pilwali Kota Surabaya. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Bidang Sosialisasi dan Hubungan Masyarakat, Nur Syamsi, mengatakan “optimistis target 70 persen pemilih bisa tercapai dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, Rabu 9 Desember 2015. Alasannya, antusiasme masyarakat Kota Surabaya ketika KPU melakukan sosialisasi dinilai sangat tinggi”.²

Berdasar jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Surabaya sebanyak 2.034.307 pemilih, rinciannya jumlah pemilih laki laki 994.026 pemilih dan jumlah pemilih perempuan

¹ <http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2015/4467/775-Persen-Target-Nasional-Partisipasi-Masyarakat-di-Pilkada-2015>

² <https://pilkada.tempo.co/read/news/2015/12/08/304726072/kpu-surabaya-targetkan-jumlah-pemilih-tahun-ini-70-persen>

1.040.281 pemilih dan akan memilih di 3.936 TPS se-Kota Surabaya. Hasil dari pilwali Kota Surabaya pada Tahun 2015 menempatkan jumlah perolehan suara pasangan urutan nomor 1 Dr. H. Rasiyo, M.Si dan Dra. Lucy Kurniasari sebesar 141.811 Suara (13,78 persen) dan untuk Pasangan Nomor Urut 2 Ir. Tri Rismaharini, M.T dan Whisnu Sakti Buana, S.T sebesar 887.342 suara (86.22 persen).

Persoalannya adalah tingkat partisipasi pemilih secara umum hanya 64,23 % persen. Hal ini lebih rendah daripada target yang dipatok KPU sekitar 75,5 %. Inilah yang menjadi lokus penelitian, khususnya di wilayah Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Tujuannya adalah menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik.

II. Metodologi

Di dalam penelitian ini peneliti ingin memberikan gambaran metode yang aktual dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, menganalisa dan menginterpretasikannya. Metode yang digunakan bersifat penelitian kualitatif-deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015 di Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah.³

III. Hasil Penelitian

III.1. Diskurus Partisipasi Politik

³ Lexy J, Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2004.

Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik hanya memfokuskan diri pada partai sebagai pelaku utama, akan tetapi dengan berkembangnya istilah demokrasi, banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin berpartisipasi dalam bidang politik khususnya dalam hal keputusan-keputusan mengenai kebijakan umum. Partisipasi seringkali digunakan untuk memberi kesan mengambil bagian dalam sebuah aktivitas. Mengambil bagian dalam sebuah aktivitas dapat mengandung pengertian ikut serta tanpa ikut menentukan bagaimana pelaksanaan aktivitas tersebut tetapi dapat juga berarti ikut serta dalam menentukan jalannya aktivitas tersebut, dalam artian ikut menentukan perencanaan dan pelaksanaan aktivitas tersebut.

Salah satu variabel lain yang ikut mempengaruhi partisipasi politik seseorang adalah status sosial dan ekonomi. Kedudukan sosial tertentu, misalnya orang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang tinggi dalam masyarakat akan memiliki tingkat partisipasi politik yang cenderung lebih tinggi. Demikian pula orang yang memiliki status ekonomi yang tinggi cenderung lebih aktif dalam berpartisipasi politik. Variabel lainnya ialah afiliasi politik orang tuanya dan pengalaman pengalaman organisasi yang dimilikinya.

Sementara itu Milbrath dan Goel memberikan empat alasan bervariasinya partisipasi politik seseorang.⁴ Pertama, berkenaan dengan penerimaan perangsang politik. Milbrath mengatakan bahwa keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap perangsang politik melalui kontak-kontak pribadi, organisasi, dan melalui media massa akan berpengaruh bagi keikutsertaan seseorang dalam kegiatan politik. Keterbukaan dan kepekaannya menerima perangsang politik melalui media massa akan mendorong seseorang secara aktif terlibat dalam politik. Dengan mengikuti

⁴ Ibid., hal 92

secara aktif perkembangan - perkembangan politik melalui media massa, seseorang akan memiliki referensi yang cukup aktual untuk memberikan tanggapan dan akhirnya sebagai bahan dalam partisipasi politiknya. Meskipun demikian dalam menanggapi perangsang-perangsang politik itu tentu dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, nilai-nilai, pengalaman-pengalaman, dan kepribadian yang dimiliki seseorang.

Alasan kedua, berkenaan dengan karakteristik sosial seseorang. Status ekonomi, karakter suku, usia, jenis kelamin, dan agama, merupakan karakteristik sosial yang memiliki pengaruh terhadap partisipasi politik. Ketiga, menyangkut sistem politik dan sistem partai tempat seorang individu itu hidup. Seseorang yang hidup dalam negara demokratis cenderung berpartisipasi dalam politik karena partai-partai politiknya cenderung mencari dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan massa. Sedangkan alasan yang keempat ialah berupa perbedaan regional. Perbedaan regional ini merupakan aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap perbedaan watak dan tingkah laku individu, sehingga mendorong perbedaan perilaku politik dan partisipasi politik seseorang.

III.2. Partisipasi Politik Kecamatan Semampir

Pemilihan kepala daerah secara serentak di seluruh Indonesia yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember Tahun 2015 yang lalu merupakan sarana bagi masyarakat Kota Surabaya khususnya Kecamatan Semampir didalam berpartisipasi dalam bidang politik terutama dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015. Terdapat dua pasang kandidat yang bersaing dalam pemilihan umum ini, yaitu pasangan petahanan Tri Rismaharini/Wisnu Sakti Buana yang diusung oleh Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P); serta Rasiyo/Lucy Kurniasari diusung oleh Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN). Pemilihan umum ini akhirnya dimenangi oleh pasangan Tri Rismaharini/Wisnu Sakti Buana yang diusung PDI-P dengan perolehan suara sebesar 893.087 (86,22 %) sesuai dengan keputusan KPU Kota Surabaya pada 22 Desember 2015.

Tampaknya masyarakat Kota Surabaya khususnya Kecamatan Semampir kurang antusias untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Didalam penelitian ini difokuskan kepada hasil pemungutan suara yang telah dilaksanakan. Dari hasil pemungutan suara tersebut dapat dihitung partisipasi pemilih yang telah melaksanakan pemungutan suara dengan perhitungan jumlah pengguna hak pilih dibagi dengan jumlah daftar pemilih tetap dan dikalikan 100 persen. Hal ini merupakan penghitungan baku yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam menentukan bagaimana partisipasi pemilih pada hasil perolehan suara yang dilakukan. Hal ini diutarakan oleh Bapak Nur Syamsi⁵ selaku Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat sebagai berikut:

“Data yang kami berikan itu sudah sesuai dengan penghitungan yang telah dilakukan. Untuk partisipasi pemilih ini dihitung dengan cara jumlah pengguna hak pilih atau jumlah masyarakat yang telah menggunakan hak pilih, baik surat suara sah maupun tidak sah yang meliputi pengguna hak pilih DPT, pengguna hak pilih DPTb-1, pengguna hak pilih DPPh, pengguna hak pilih DPTb-2 dibagi dengan jumlah data pemilih yang meliputi DPT, DPTB-1, DPPh, dan DPTb-2, lalu dikalikan 100 persen.”

Dari wawancara diatas telah jelas bahwa cara menghitung partisipasi pemilih yang digunakan oleh KPU sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Partisipasi Pemilih Tingkat Kelurahan Kecamatan Semampir
Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015

NO	KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH PEMILIH	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	PARTISIPASI PEMILIH (%)
1	2	3	4	5
1	AMPEL	14.886	6.279	42.18
2	PEGIRIAN	22.232	9.153	41.17
3	SIDOTOPO	23.138	9.640	41.66
4	UJUNG	25.430	8.539	33.58
5	WONOKUSUMO	44.126	19.294	43.72
JUMLAH		129.812	52.905	40.76

⁵ Nur Syamsi, S.Pd, merupakan Kepala Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kota Surabaya

TINGKAT PARTISIPASI KECAMATAN SEMAMPIR	40,76 %
---	----------------

Sumber data : KPU Kota Surabaya

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi pemilih yaitu sebesar 40.67 %. Hal ini merupakan tingkat partisipasi yang paling rendah di Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015. Hal ini sesuai dengan bab sebelumnya pada tabel 1.2 bahwa Kecamatan Semampir merupakan kecamatan yang mempunyai tingkat partisipasi pemilih paling rendah di Kota Surabaya. Hal ini juga dikatakan oleh Bapak Nur Syamsi, sebagai berikut:

“Pada Pilwalkot Surabaya Tahun 2015, tingkat partisipasi pemilih Kota Surabaya sebesar 52,17 %. Hal ini bisa dibilang rendah tingkat partisipasinya. Untuk partisipasi tingkat kecamatan dapat dilihat bahwa Kecamatan Semampir memiliki tingkat partisipasi yang rendah diantara kecamatan lainnya di wilayah Kota Surabaya. Partisipasi Kecamatan Semampir sebesar 49,76 % ”

Hal ini juga diutarakan oleh Bapak Hery Prasetyo⁶, yaitu:

“Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015, memang benar, Kecamatan Semampir tingkat partisipasinya rendah. Data dari KPU Kota Surabaya itu juga sudah valid. Data dari KPU itu sudah tercantum mulai dari TPS, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan sampai tingkat Kota Surabaya.”

Dari tabel dan pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, Kecamatan Semampir memiliki tingkat partisipasi yang rendah yaitu sebesar 40,76%

III.3. Faktor – Faktor Partisipasi Politik

Pola partisipasi politik dapat dilihat dari piramida pola partisipasi yang dibedakan menjadi dua. Piramida partisipasi I menurut Milbrath dan Goel, memperlihatkan bahwa masyarakat dibagi dalam tiga kategori: a. pemain (*gladiators*) yaitu orang yang sangat aktif dalam dunia politik. B. penonton (*spectators*) yang termasuk populasi yang aktif secara minimal, termasuk

⁶ Bp. Hery Prasetyo, S.STP, MM, merupakan Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Semampir, Kota Surabaya

menggunakan hak pilihnya, c. apatis (*apathetic*) yaitu orang yang tidak aktif sama sekali, termasuk tidak menggunakan hak pilihnya.⁷

Piramida partisipasi politik II, menurut David F Roth dan Frank L. Wilson, melihat masyarakat terbagi dalam empat kategori: a. aktivis (*activists*) terdiri dari atas pejabat publik atau calon pejabat publik, fungsionaris partai politik, pimpinan kelompok kepentingan, the deviant (termasuk didalamnya pembunuh dengan maksud politik, pembajak, dan teroris). b. partisipan (*participants*) terdiri dari orang yang bekerja untuk kampanye, anggota partai secara aktif, partisipan aktif dalam kelompok kepentingan dan tindakan – tindakan yang bersifat politis, serta orang yang terlibat dalam komunitas proyek. c. Penonton (*Onlookers*) adalah orang yang menghadiri reli-reli politik, anggota dalam kelompok kepentingan, *pe-lobby*, pemilih, orang – orang yang terlibat dalam diskusi politik, serta pemerhati pembangunan politik, d. apolitis (*apoliticals*).⁸

Partisipasi politik masyarakat memiliki perbedaan dalam intensitas dan bentuknya. Hal itu di samping berkaitan dengan sistem politik, juga berhubungan dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Myron Weiner, terdapat lima hal yang dapat mempengaruhi partisipasi politik yang lebih luas.⁹ Pertama adalah modernisasi. Modernisasi di segala bidang berimplikasi pada komersialisasi pertanian, industrialisasi, meningkatnya arus urbanisasi, peningkatan kemampuan baca tulis, perbaikan pendidikan, dan pengembangan media massa/media komunikasi secara lebih luas. Kemajuan itu berakibat pada partisipasi warga kota baru seperti kaum buruh, pedagang, dan professional untuk ikut serta mempengaruhi kebijakan dan menuntut keikutsertaannya dalam kekuasaan politik

⁷ Miriam Budiarjo, Dasar – dasar Ilmu Politik, ed.revisi, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal 372

⁸ Ibid., hal 372

⁹ Sudjono Sastroatmojo, Perilaku Politik, Semarang, IKIP, 1995, hal 89.

sebagai bentuk kesadarannya bahwa mereka pun dapat mempengaruhi nasibnya sendiri.

Faktor kedua adalah terjadinya perubahan dalam struktur kelas sosial. Perubahan struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang makin meluas dalam era industrialisasi dan modernisasi, sehingga membawa perubahan dalam pola partisipasi politik. Faktor ketiga adalah Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa merupakan faktor partisipasi politik masyarakat. Ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme, dan egaliterisme membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Komunikasi yang meluas mempermudah penyebaran ide-ide itu ke seluruh lapisan masyarakat. Hal itu berimplikasi pada tuntutan rakyat dalam ikut serta mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Faktor keempat adalah adanya konflik di antara pemimpin-pemimpin politik. Pemimpin politik yang bersaing memperebutkan kekuasaan seringkali dilakukan dengan cara mencari dukungan massa. Implikasinya adalah munculnya tuntutan terhadap hak-hak rakyat, sehingga pertentangan dan perjuangan kelas menengah terhadap kaum bangsawan yang memegang kekuasaan mengakibatkan perluasan hak pilih rakyat. Faktor kelima adanya keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah ini seringkali merangsang tumbuhnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik.

Ramlan Surbakti menyebutkan dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi-rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang, yakni kesadaran politik seseorang dan kepercayaan

politik terhadap pemerintah.¹⁰ Aspek kesadaran politik seseorang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara baik hak-hak politik, ekonomi, maupun hak mendapat jaminan sosial dan hukum. Selain itu, kewajibannya sebagai warga negara dalam sistem politik maupun kehidupan sosial juga berpengaruh terhadap tinggi rendahnya partisipasi politik. Faktor pertama tersebut sebenarnya juga menyangkut seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki seseorang akan lingkungan masyarakat dan politik di sekitarnya. Faktor kedua menyangkut bagaimanakah penilaian dan apresiasinya terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan-kebijakan maupun terhadap pelaksanaan pemerintahannya. Penilaian itu merupakan rangkaian dari kepercayaannya, baik yang menyangkut apakah pemerintah itu dapat dipercaya atau tidak, maupun apakah pemerintah dapat dipengaruhi atau tidak. Artinya, jika mereka memandang pemerintah tidak dapat dipengaruhi dalam proses pengambilan keputusan politik, maka bagi mereka berpartisipasi secara aktif adalah hal yang sia-sia.

Berangkat dari diskursus di atas, maka peneliti menganalisa terdapat dua faktor partisipasi politik warga Kecamatan Semampir di pilwali Kota Surabaya.

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri yang dapat mempengaruhi keikutsertaannya dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015 di Kecamatan Semampir terutama sekali dalam proses pemberian suara. Dalam penelitian ini kondisi sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Semampir mempunyai pengaruh dengan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015 di Kecamatan Semampir. Diduga mereka yang mempunyai status ekonominya tinggi maka akan mempunyai partisipasi politik

¹⁰ Ibid., hal 91

yang tinggi pula. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terpenting dalam mempengaruhi partisipasi politik di Kecamatan Semampir, yaitu pendidikan, dan kehidupan ekonomi masyarakat. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Hery Prasetyo,

“saya rasa status ekonomi serta sosial budaya di masyarakat khususnya masyarakat Semampir, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tingkat pendidikan, pekerjaan/penghasilan dan adat nya masyarakat Semampir. Untuk tingkat partisipasi di PIlwalkot Tahun 2015 kenapa rendah, mungkin ya karena faktor – faktor tersebut di masyarakat Semampir.”

Oleh sebab itu adapun faktor internal tersebut meliputi :

a. Tingkat Pendidikan

Pendidikan sangat erat kaitan dengan kualitas sumber daya manusia, karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang tersebut semakin bagus kualitasnya. Tingkat pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap partisipasi pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015 di Kecamatan Semampir. Karena semakin bagus pendidikannya maka semakin tinggi pula tingkat partisipasinya dan begitupun juga sebaliknya. Hal ini dikarenakan orang yang berpendidikan lebih mampu dalam menganalisa informasi yang diterima, serta memiliki kemampuan untuk mengetahui bentuk partisipasi yang dilakukan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.

Perbedaan tingkat pendidikan seseorang pada masyarakat Kecamatan Semampir dapat dilihat pada bab sebelumnya pada tabel 2.5 didalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat Semampir masih rendah. Walaupun tinggal didaerah perkotaan tidak otomatis berpendidikan tinggi, melainkan masyarakat Kecamatan Semampir mempunyai pendidikan SLTP/ sederajat. Oleh sebab itu tingkat pendidikan secara otomatis mempengaruhi kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi politik. Seperti yang dikatakan oleh ibu Sri Wahyuni¹¹ warga masyarakat Kecamatan Semampir, sebagai berikut:

¹¹ Sri Wahyuni, Ibu Rumah tangga, 41 Tahun warga Tenggumung Baru Selatan

“saya gak ngerti politik mas, saya Cuma ibu rumah tangga dan lulusan SMP. Gak melu melu urusan politik. Kemarin aku gak nyoblos mas, karena ya apa ya ... sama aja aku milih juga kayak gini gini aja..penting anak bojo gak protes mas.”

Saudara Tirta Bayu Rizky Aditya¹² yang merupakan juga mengatakan:

“pendidikan terakhir saya SMA. Pada waktu pemilu kemaren saya ikut nyoblos mas. Pada waktu itu saya juga sudah bekerja di Pabrik mas”

Hal tersebut juga diutarakan oleh Bapak Hery:

“memang tingkat pendidikan Masyarakat Kecamatan Semampir rendah, sesuai data yang kami berikan. Bisa dilihat sebagian besar masyarakat Semampir memiliki tingkat pendidikan SLTP/ sederajat. Bahkan tingkat pendidikan antara SMA/ sederajat dan Sarjana memiliki persentase yang terbilang kecil dibandingkan tingkat pendidikan SLTP sederajat sampai tidak tamat/SD sederajat. Tingkat pendidikan yang rendah merupakan suatu kendala yang harus diatasi Pemerintah Kota Surabaya. Hal ini muncullah kebijakan dengan menggratiskan SPP untuk pendidikan SD, SMP, dan SMA. Oleh sebab itu, ketika pendidikan masyarakat itu rendah maka nantinya tidak akan ada inisiatif untuk bisa mengikuti proses Pilwalkot ini. Masyarakat Semampir masih banyak yang berpendidikan rendah. Mereka mempunyai pikiran kalau ada uangnya mereka baru bergerak, apabila tidak uangnya mereka pun enggan bergerak. Berbeda dengan yang berpendidikan tinggi, mereka mempunyai kesadaran penuh, yang mungkin didukung dari media cetak baik koran ataupun majalah dan media sosial yang selalu mereka lihat mereka akan lebih sadar betapa pentingnya proses Pilwalkot ini. Masyarakat berpendidikan tinggi, otomatis kantau mana yang hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Kalau tingkat pendidikan rendah, boro-boro ingat sama hak dan kewajiban , yang penting ada uang mereka berangkat, gak ada ya mereka acuh”

Dari pernyataan diatas maka diketahui bahwa masyarakat berpendidikan tinggi lebih banyak mengerti dan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga Negara khususnya dalam bidang politik, karena cenderung sadar terhadap pentingnya ikut dalam berpartisipasi .masyarakat yang berpendidikan tinggi semakin tinggi pengetahuan dan wawasan mengenai pemilu maka semakin banyak informasi yang didapat baik melalui media elektronik maupun media cetak sebagai bahan diskusi atau obrolan semata. Berbeda dengan masyarakat yang berpendidikan rendah, mereka lebih berpikiran hanya termotivasi karena uang. Apabila ada uang mereka

¹² Tirta Bayu Rizky Aditya, umur 25 Tahun, Karyawan Swasta

berangkat apabila tidak ada mereka tidak berangkat. Oleh sebab itu tingkat partisipasi pemilih sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat.

b. Kondisi Kehidupan Ekonomi

Kondisi kehidupan ekonomi juga tidak luput dari kondisi pekerjaan masing – masing masyarakatnya. Tingkat pekerjaan juga dapat menentukan bagaimana partisipasi politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015. Bagaimana dan dimana pekerjaannya juga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Hal ini diutarakan oleh Sdr. Tirta Bayu Rizky

“pada saat pencoblosan itu tidak semua libur mas. Ada beberapa teman saya juga efektif bekerja. Kebetulan saya juga tidak libur, tetapi jam masuk kerja dimundurkan. Saya bekerja ikut orang mas, banyak dilingkungan saya itu bekerja sebagai buruh mas. Temen saya yang bekerja sebagai tukang sama kuli juga gak libur mas. PNS kali ya mas dikasih libur. Kita yang swasta gini mana bisa libur meskipun ada kebijakan libur.”

Hal ini juga diutarakan oleh Sdr. Sigit Arfianto¹³ yaitu sebagai berikut:

“saya bekerja buka usaha sendiri mas, jadi ya ikut nyoblos. Mungkin yang lainnya pada gak libur. Saya kurang tau juga. Tapi kelihatannya yang PNS libur tapi kalo seng melu orang apalagi cino gak bakalan prei mas.”

Menurut dari pernyataan dari KPU yaitu Bpk. Nur Syamsi yaitu:

“iya .. pada tanggal 9 Desember 2015 merupakan hari libur nasional sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 sebagai Hari Libur Nasional”

Sedangkan menurut Bapak Herry Prasetyo mengatakan sebagai berikut :

“pada tanggal 9 Desember 2015 itu ditetapkan sebagai hari libur nasional. Kenapa kok partisipasi rendah di Kecamatan Semampir, kemungkinan dari faktor pekerjaan juga bisa ya. Kemungkinan karena libur, orang cenderung untuk menikmati liburan tersebut. dan mereka terlena saking enaknyanya libur. Bisa jadi begitu. Tetapi di Kecamatan Semampir sebagian besar mereka bekerja sebagai karyawan swasta atau buruh. Daripada mereka tidak masuk, atau terlambat kerja gara-gara ikut pemilu, lebih baik mereka gak ikut pemilu. Apalagi mereka banyak

¹³ Sigit Arfianto, 35 Tahun. Pekerjaan karyawan swasta dan wirausaha

yang di upah harian, dan juga ada juga yang dipotong gaji apabila terlambat atau tidak masuk kerja.”

Pada bab pendahuluan pada tabel 2.7 jelas bahwa jenis pekerjaan didominasi oleh pegawai swasta dan wiraswasta serta paling banyak adalah belum memiliki pekerjaan yang tetap. Dari tabel dan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa, di Kecamatan Semampir pekerjaan seseorang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik dimasyarakat. Orang yang bekerja di swasta cenderung tidak melaksanakan pemilihan karena dengan tidak masuk atau terlambat kerja maka akan dipotong gaji. Dan sebagian ada yang diupah harian, dan akan berpengaruh pada gaji seseorang tersebut. Hal ini menjadi motivasi dalam memilih kurang.

c. Kondisi Sosial Budaya

Didalam suatu masyarakat, terdapat beberapa adat atau budaya yang melatarbelakangi terbentuknya pola kehidupan di masyarakat. Hal tersebut juga akan mempengaruhi bagaimana tingkat partisipasi masyarakat di suatu daerah. Hal tersebut juga diutarakan oleh bapak Herry Prasetyo, sebagai berikut:

“Di Kecamatan Semampir sebagian besar penduduknya adalah suku Madura dan Jawa, di Kelurahan Ampel terdapat juga arab keturunan. Untuk partisipasi masyarakat ini dipengaruhi oleh adat. Di sebagian besar Masyarakat Semampir, mereka masih percaya kepada kyai – kyai di setiap daerah Semampir. Apabila kyai nya bilang jangan memilih A, maka sebagian besar masyarakat juga tidak akan memilih A. hal itu nampak sekali di kehidupan masyarakat Semampir. Jadi Kyai masih menjadi tolok ukur masyarakat. Adat disini seperti itu. Jadi partisipasi juga dipengaruhi oleh adat seperti itu.”

Dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan, bahwa yang mempengaruhi terhadap partisipasi pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015 di Kecamatan Semampir yaitu adat istiadat setempat dalam hal ini yaitu tokoh agama atau tokoh masyarakat sangat berpengaruh didalam menggerakkan masyarakat Semampir.

3.1.1 Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat yang berasal dari luar diri masyarakat itu sendiri. Adapun faktor eksternal yaitu dapat dilihat dari peranan pemerintah. Peranan pemerintah sangat penting didalam proses pelaksanaan pemilihan umum, karena pemerintah sebagai penyelenggara pemilihan umum dalam hal ini dilimpahkan kepada Komisi Pemilihan Umum. Sukses atau tidaknya penyelenggaraan pemilihan umum sangat bergantung pada pemerintah.

Peranan pemerintah dapat dilihat dari sosialisasi pemilihan umum yang merupakan salah satu program yang dirancang untuk keperluan suksesnya pelaksana dan pelaksanaan pemilu dalam hal ini Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015. Sehingga bagaimana caranya agar program sosialisasi yang dilakukan ini dapat berjalan efektif dan efisien. Selain itu juga peranan pemerintah dengan membuat aturan aturan mengenai pemilu tersebut dalam hal ini yaitu Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang. Hal ini diutarakan oleh anggota KPU Bpk. Nur Syamsi yaitu sebagai berikut :

“kegiatan KPU Kota Surabaya pada Tahun 2015 telah dilakukan semaksimal mungkin. Sosialisasi kita lakukan mulai dari media cetak, media elektronik pun sudah dilakukan. Sampai pemasangan spanduk spanduk di jalan – jalan protokol Surabaya. Selain itu juga di tempat tempat strategis juga ada kita selalu sosialisasikan baik menggunakan selebaran maupun pengumuman via mobil berjalan. Kepada tingkat kelurahan dan kecamatan juga selalu kita koordinasikan untuk mensukseskan Pilwalkot Surabaya. Sosialisasi ini juga tertuang didalam Keputusan KPU Surabaya Nomor 7/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015 tentang Pedoman teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015”

Hal tersebut juga diutarakan kepada Bapak Herry Prasetyo, yaitu sebagai berikut:

“KPU juga pernah mengundang aparat kecamatan didalam sosialisasi Undang – Undang Pilkada Tahun 2015 serta sosialisasi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Surabaya Tahun 2015. Kecamatan Semampir juga selalu berkoordinasi dengan lurah – lurah agar selalu mensosialisasikan dengan meneruskan ketingkat RT dan RW. Terdapat standing banner juga yang dipasang didepan pintu kantor kecamatan. Selain itu juga selalu koordinasi dengan Lurah setempat agar Daftar Pemilih Sementara di cek, apakah sudah benar dan ada keberadaan orang per orang di setiap kelurahan”

Menurut pendapat dari masyarakat ibu Sri Wahyuni yaitu sebagai berikut:

“iya mas dijalan – jalan dipasang spanduk – spanduk. Sak elingku pak RT juga ngomong ojo lali nyoblos tanggal 9 Desember. Pernah juga di cek, jumlah pemilih di rumah.”

Hal ini pun juga diutarakan oleh Sdr. Tirta Bayu Rizky,

“setahu saya disosialisasikan lewat spanduk, koran trus kayak iklan di jtv, sama kalo saya lewat depan KPU Surabaya ada digital analog yang menunjukkan kurang berapa hari pencoblosan mas. Ya sudah sesuai sih mas kalo sosialisasi nya.”

Peranan pemerintah sangat penting untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu tersebut. Apalagi pemerintah sebagai penyelenggara. Oleh sebab itu faktor eksternal dari peranan pemerintah sangat berpengaruh terhadap partisipasi.

IV. Kesimpulan

Indikator pada permasalahan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015 di Kecamatan Semampir Kota Surabaya adalah partisipasi pemilih pada hasil pemungutan suara yang telah dilakukan. Berdasarkan olah data tabel frekuensi menunjukkan bahwa partisipasi pemilih pada hasil pemungutan suara di Kecamatan Semampir sebesar 40,76 %.

Faktor – faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015 di Kecamatan Semampir Kota Surabaya adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri (sosial, budaya dan pendidikan) yang dapat mempengaruhi keikutsertaanya dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum terutama sekali dalam proses pemberian suara.

Faktor eksternal merupakan faktor – faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat yang berasal dari luar diri masyarakat itu sendiri. Adapun faktor eksternal itu dapat berupa peranan pemerintah dan peranan dari partai politik itu sendiri. Sejauh ini apa yang dilakukan pemerintah sesuai dengan apa yang di rencanakan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, ed. Revisi, Jakarta: Gramedia, 2008
- Firmanzah, *Marketing Politik*, ed. Pertama, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007
- Gatara, A.A Said dan Mohd Dzulkiah Said, M.Si, *Sosiologi Politik :Konsep Dan Dinamika Perkembangan Kajian*, 2007
- Haris, Syamsuddin, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004
- Nasution, Prof. Dr, *Metode penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005
- Prihatmoko dan Joko J, *Mendemonstrasikan Pemilu*, Yogyakarta: PustakaBelajar, 2008
- Sastroadmodjo, Sudijono, *Perilaku Politik*, Semarang: IKIP, 1995
- Scumpeter, Joseph, *Capitalism Socialism and Democracy*, New York: Jarper, 1947
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 1992
- Suryabrata, Sumadi, *Penelitian Kualitatif*, ed. Keempat, Jakarta: Bumi Aksara, 2004

Jurnal

- R, Sofiah, Kampanye Politik dan Perilaku Pemilih, *Jurnal Dinamika vol 5 no 1 tahun 2005*, Surakarta: FISIP Universitas Sebelas Maret, 2005
- Susanto, Pilkada Langsung : KajianYuridis Dan Politis, *Jurnal Dinamika vol 5 no 1*, Surakarta: FISIP Universitas Sebelas Maret, 2005
- Yanuarti, Sri, Golput dan Pemilu di Indonesia, dalam *Jurnal Penelitian Politik vol 6 no 1*, 2009

Internet

<https://pilkada.tempo.co/read/news/2015/12/08/304726072/kpusurabayatargetkanjumlahpemilihtahuni>
[ni 70 persen](#)

<https://pilkada2015.kpu.go.id/surabayakota>

<http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2015/4467/775-Persen> Target Nasional

Partisipasi Masyarakat di Pilkada 2015